

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Agung Nurrahman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
agung_nurrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The focus of this study is to find a picture related to the government's efforts to overcome the problem of unemployment in Indonesia. The method of writing this study uses library research. The results of the study show that: government efforts to overcome unemployment in Indonesia can be done through several forms, namely (1) the availability of accurate information related to employment; (2) the implementation of job training; (3) supervision related to improving the quality of education and entrepreneurship; (4) increasing socialization related to information literacy based on social inclusion. The suggestion that can be given by the writer is that the Government needs to be serious in overcoming the problem of unemployment in Indonesia by preparing policies, strategies and concrete steps to overcome the problem of unemployment. The government should collaborate with companies, educational institutions and / or training institutions in creating jobs so as to reduce unemployment in Indonesia.

Keywords: *Unemployment, Government Efforts, Indonesia*

ABSTRAK

Fokus kajian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Adapun metode penulisan kajian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu (1) tersedianya informasi akurat terkait lapangan pekerjaan; (2) terselenggaranya pelatihan kerja; (3) pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan; (4) peningkatan sosialisasi terkait literasi informasi berbasis inklusi sosial. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Pemerintah perlu serius dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia dengan mempersiapkan kebijakan, strategi dan langkah konkrit mengatasi permasalahan pengangguran. Pemerintah seyogyanya berkolaborasi dengan perusahaan, lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia.

Kata kunci: Pengangguran, Upaya Pemerintah, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data *Worldometers*, pada April 2019, Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk

sebanyak 269 juta jiwa (3,49 % dari total populasi dunia). Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut menimbulkan dampak sekaligus permasalahan kependudukan di Indonesia. Salah satu permasalahan

kependudukan yang tidak dapat dihindari adalah pengangguran. Pengangguran disebabkan karena meningkatnya tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu indikator di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengukur sejauhmana angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang disediakan tersebut. Meningkatnya angka pengangguran akan berdampak pula pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas, dan keadaan ekonomi. Pada penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Franita, Riska (2016) bahwa pada negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi suatu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah karena dapat memberikan dampak pada keadaan ekonomi dan sosial suatu negara.

Merujuk pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dikutip melalui *cnnindonesia*, disebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 50 ribu orang per Agustus 2019. Maknanya, apabila dibandingkan dengan kondisi jumlah pengangguran pada tahun 2018 (sebanyak 7 juta orang) maka jumlah pengangguran di tahun 2019 meningkat menjadi 7,05 juta orang. Data tersebut menunjukkan suatu masalah bahwa hingga saat ini pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah dituntut mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Adapun rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah

Indonesia dalam mengatasi pengangguran di Indonesia?. Adapun tujuan penulisan kajian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran di Indonesia.

Hasil penelitian sebelumnya menggambarkan terdapat beberapa upaya mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu melalui pendidikan, pelatihan, perluasan obyek wisata di daerah, dukungan kepada wisata kuliner, dan mendorong investor berinvestasi di Indonesia (Franita, Riska, 2016). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih, Sri (2005) menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan pembangunan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia namun pengangguran masih banyak di Indonesia terutama pengangguran tenaga sektor informal yang tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja sektor formal. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah akan melakukan kajian mengenai bagaimana kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan memberikan kajian terkait bentuk upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa dalam indikator ketenagakerjaan, yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sukirno (2000:8) menyatakan bahwa pengangguran merupakan keadaan seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya.

Sementara seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran apabila ia benar-benar sudah mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Dalam Teori Kependudukan dari Malthus dijelaskan bahwa pertumbuhan persediaan makanan cenderung tidak dapat terlampaui oleh pertumbuhan penduduk. Telaahan lebih dalam teori Malthus menegaskan bahwa setiap penduduk akan bertumbuh dalam jangkauan yang tak terbatas jumlahnya hingga mencapai pada batas makanan yang tersedia. Akibatnya, penduduk akan berlomba dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mencari sumber makanan, sehingga akan ada penduduk yang memperoleh makanan, namun di sisi lain akan ada penduduk yang tidak mampu memperoleh makanan. Pada perkembangannya, suatu masyarakat modern, terdapat penduduk yang semakin banyak jumlahnya, tetapi kesempatan pekerjaan tidak sebanyak jumlah penduduk tersebut. Oleh karena itu, penduduk akan mulai bersaing dalam pencarian pekerjaan. Akibatnya, akan ada penduduk yang memperoleh pekerjaan namun di sisi lain, akan terdapat pula penduduk yang dikategorikan sebagai penganggur.

Jenis-Jenis Pengangguran

Mengutip pernyataan Sukirno (2000:8-9), Jenis-jenis pengangguran menurut sebab terjadinya pengangguran dibagi menjadi 2 (dua) jenis pengangguran, yaitu:

1. Pengangguran friksional

Makna dari pengangguran friksional adalah disaat terjadi kesusahan sementara antara pencari pekerjaan dengan lowongan kerja yang tersedia. Maksudnya, disaat pencari pekerjaan belum menemukan lowongan kerja, baik karena alasan waktu, jarak, maupun

informasi yang kurang maka seseorang termasuk kedalam jenis pengangguran friksional.

2. Pengangguran struktural

Makna dari pengangguran struktural adalah disaat terjadi permasalahan struktur atau permasalahan komposisi perekonomian. Maksudnya, pada perubahan terjadi pada struktur maka berdampak pada kebutuhan keterampilan dari tenaga kerja. Namun, pencari kerja belum bisa beradaptasi dengan keterampilan yang dibutuhkan tersebut. Dengan demikian, seorang pencari kerja tersebut termasuk ke dalam jenis pengangguran struktural.

Sukirno (1994) membagi pengangguran ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Pengangguran terbuka

Penyebab terjadinya pengangguran terbuka adalah disaat kondisi pertambahan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan lowongan pekerjaan yang tersedia.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi disaat tenaga kerja yang dimiliki kelebihan karena beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya antara lain, berkaitan dengan jenis kegiatan pada perusahaan tersebut, kecil besarnya perusahaan tersebut, jenis intensif yang digunakan oleh perusahaan tersebut dan capaian tingkat produksi suatu perusahaan. Misalnya: pelayan restoran yang dibutuhkan sudah melebihi kebutuhan sehingga kelebihan pelayan tersebut termasuk kedalam kelompok pengangguran tersembunyi.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman bergantung pada beberapa faktor terutama faktor musim atau cuaca. Misal, pekerja pada sektor pertanian atau perikanan. Dimana apabila

cuaca baik maka petani/nelayan dapat memperoleh untung yang besar namun ketika cuaca buruk bisa saja tidak ada penghasilan yang diperoleh dan pekerja tersebut harus menganggur karena tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani atau sebagai nelayan.

4. Setengah menganggur

Pekerja yang setengah menganggur umumnya terjadi akibat urbanisasi yang berkembang di Indonesia. Sebagian besar dari penduduk tersebut sulit menemukan pekerjaan di kota, ada juga yang bisa bekerja hanya satu atau dua hari dalam satu minggu. Pekerja seperti ini termasuk kedalam kelompok setengah menganggur.

Dampak Pengangguran

Adapun beberapa dampak pengangguran menurut Sukirno (2000) antara lain sebagai berikut:

1. Akibat pada kegiatan perekonomian

Pengangguran dapat berdampak pada kegiatan perekonomian dimana pengangguran bisa menjadi penyebab pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya) diperoleh masyarakat lebih tinggi daripada pendapatan nasional riil (nyata). Selain itu penerimaan pajak menjadi rendah apabila pengangguran terjadi. Dampak lainnya, pengangguran dapat menjadi penyebab kurangnya keinginan investasi perusahaan.

2. Akibat pada individu dan masyarakat

Pada individu dan masyarakat, pengangguran memberikan dampak kehilangan pendapatan, hilangnya keterampilan, dan tidak stabilnya sosial dan politik.

METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dimana penulis melakukan penelusuran informasi baik dari buku, internet maupun peraturan perundang-undangan mengenai fokus kajian. Selain itu penulis juga mengumpulkan dokumen dan data yang berkaitan dengan fokus kajian seperti data dari Badan Pusat Statistik mengenai jumlah pengangguran di Indonesia.

ANALISIS PEMBAHASAN

Permasalahan Pengangguran di Indonesia

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik bahwa pada per Februari 2019, Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah total angkatan kerja / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia adalah 5,01 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1
Tingkat Pengangguran (%)
(Sumber: cnbcindonesia.com)

Capaian angka 5,01 % tersebut dimaknai sebagai angka yang terendah pada perjalanan penyelesaian masalah pengangguran di Indonesia. Melihat data yang ada, Indonesia masih tertinggal oleh Negara Malaysia (3,3 % per Juni 2019) dan Negara Vietnam (2,16 % per Juni 2019). Apabila membandingkan Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan kedua negara

tersebut, akan muncul asumsi bahwa kedua negara tersebut memperoleh persentase yang lebih rendah karena penduduknya yang sedikit. Namun, asumsi tersebut terbantahkan dengan hasil yang diperoleh negara Cina pada Juni 2019 lalu. Populasi penduduk Cina merupakan populasi yang terbanyak bila dibandingkan dengan seluruh negara di dunia. Namun, Cina dapat mencapai penekanan angka pengangguran pada angka 3,61 %. Maksudnya, dari populasi penduduk Cina, maka hanya 1/5 yang menjadi pengangguran. Dengan demikian, jumlah penduduk bukanlah satu-satunya penyebab pengangguran di Indonesia. Namun ada faktor lainnya yang turut memengaruhi masalah pengangguran masih terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja.

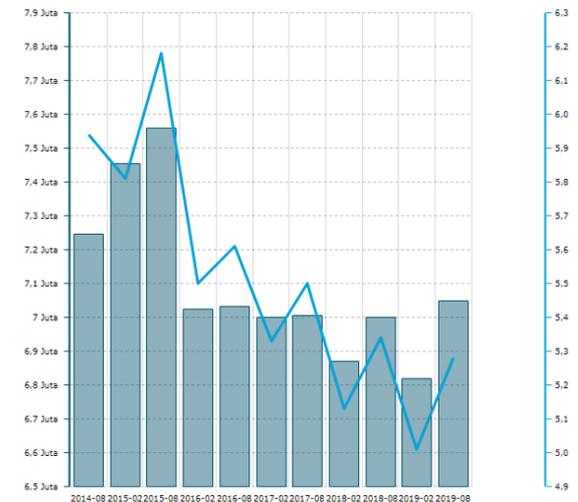
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan pembangunan ekonomi hingga kebijakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian terdahulu yaitu yang disampaikan oleh Hermuningsih (2005), bahwa pasca rezim Soeharto jatuh, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang dominan pada orientasi kapitalisme. Pemerintah Indonesia mengadopsi pandangan Rostow terkait 5 (lima) tahap pembangunan ekonomi yang kemudian diwujudkan kedalam Program Pembangunan Lima Tahun dan Program Pembangunan Jangka Panjang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak banyak menguntungkan penduduk Indonesia karena perusahaan besar yang ada tidak dapat memwadahi angkatan kerja Indonesia. Keberadaan tenaga kerja

harus bisa bersaing pada sektor formal karena menuntut keterampilan dan keahlian. Akibat tidak mampu bersaing maka pencari kerja sektor informal terpaksa terabaikan.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dikutip melalui liputan6.com, diketahui bahwa langkah Pemerintah mengatasi pengangguran terlihat pada kebijakan peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Melalui hal tersebut, Pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Langkah tersebut diambil agar mampu mencapai nilai tambah khususnya pada pembukaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran.

Jumlah dan Persentase Pengangguran dalam 5 Tahun Kepemimpinan Jokowi (Agt 2014-Feb 2019)



Gambar 2

Jumlah dan Presentase Angka Pengangguran (Sumber: Badan Pusat Statistik)

Kebijakan Pemerintah tersebut menunjukkan hasil signifikan yaitu pada Agustus 2019 tercatat pada data BPS bahwa jumlah pengangguran terbuka sejumlah 5,28 % (7,05 juta orang). Secara angka, maka jumlah tersebut naik apabila dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus

2019 (7 juta orang) namun secara presentase mengalami tren penurunan (dari 5,34 % menjadi 5,28 %). Hal tersebut terjadi karena walau pada periode yang salam, namun jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2019 (197,92 juta) lebih banyak dibandingkan tahun 2018 (194,78 juta). Secara data BPS Pada Agustus 2019 ebih lanjut diketahui bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebagai tingkat pengangguran tertinggi (10,42 %). Kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas (7,95 %), lulusan Diploma (5,99 %) dan lulusan Universitas (5,67 %). Presentase pengangguran di kota (6,31 %) sedangkan di desa (3,93 %).

Hasil kerja 5 (lima) tahun kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menunjukkan hasil tren penurunan angka pengangguran namun bukan berarti masalah pengangguran di Indonesia selesai begitu saja. Mengingat jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun maka diperlukan upaya dan langkah konkrit Pemerintah yang mampu mengatasi permasalahan pengangguran hingga ke akar sehingga pengangguran tidak terjadi lagi (hilang) dan penduduk merasakan masa depan yang lebih baik untuk hidup di Indonesia.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pengangguran di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berikut merupakan analisa dari penulis berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah agar pengangguran di Indonesia dapat teratasi secara lebih baik.

Pertama, Pemerintah perlu menyediakan informasi akurat mengenai lapangan pekerjaan dalam berbagai media yang disertai dengan transparansi. Lapangan pekerjaan disediakan oleh pemerintah untuk menyerap

angkatan kerja atau lulusan sekolah/universitas agar tidak menganggur. Lapangan kerja yang disediakan bisa dilakukan dengan menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan angkatan kerja yang banyak. Tentunya, pemetaan para pencari kerja perlu dilakukan dengan rinci agar lapangan kerja yang tersedia bisa seimbang dan memenuhi kebutuhan pencari kerja.

Kedua, Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan kerja secara gratis kepada penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan, bila perlu program tersebut tidak hanya ditujukan kepada penduduk pencari kerja namun rutin dan terstruktur telah diprogramkan sejak penduduk tersebut masih berada di bangku sekolah/universitas. Pelatihan bisa diselenggarakan dengan kolaborasi/kerjasama dengan lembaga pelatihan/pendidikan yang ada di lingkungan penduduk tersebut. Pelatihan kerja cenderung lebih dibutuhkan bagi penduduk yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik sehingga tidak memiliki keterampilan atau keahlian dalam bekerja namun seiring perkembangan teknologi, banyak hal yang perlu dikembangkan juga oleh penduduk lulusan sekolah/universitas. Hal senada disampaikan oleh Franita, Riska (2016) bahwa tujuan dari pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah adalah agar pencari kerja memiliki keterampilan sehingga bisa mandiri. Dalam hal ini lebih lanjut ditegaskan bahwa Pemerintah perlu cepat tanggap dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan yang akan diselenggarakan kepada penduduk Indonesia yang membutuhkan.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu Pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terkait dengan angka putus sekolah, atau anak yang tidak mampu bersekolah karena biaya pendidikan. Oleh karenanya Pemerintah perlu hadir untuk memberikan akses pendidikan gratis sebagai upaya pemenuhan hak dasar penduduk Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya mencatat bahwa pendidikan berperan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten karena pada pendidikan yang terselenggara tersebut, pencari kerja akan diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai pendukung dalam mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan/wiraswasta (Franita, Riska, 2016). Hal lain yaitu, Pemerintah perlu meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Indonesia. Mengingat, tidak semua orang senang dan berbakat melakukan pekerjaan kantor. Oleh karenanya, Pemerintah perlu memfasilitasi penduduk yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga kelompok tersebut bisa memperoleh lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah.

Keempat, Pemerintah perlu menyediakan dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan literasi informasi berbasis inklusi sosial kepada penduduk Indonesia. Dalam hal ini, apabila penduduk giat dalam cerdas informasi dan mau meningkatkan kemampuan/keterampilan dirinya, maka penduduk dapat secara mandiri memperoleh informasi tersebut. Informasi dari buku atau media lainnya tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada penduduk berkaitan dengan keterampilan sehingga penduduk bisa mandiri dalam menghasilkan pekerjaan baru dan/atau memiliki keterampilan baru.

Berbagai upaya yang disampaikan penulis tersebut memerlukan perhatian dan keseriusan dari Pemerintah dalam penerapannya sehingga Pemerintah dapat menyeimbangi tersedianya lapangan

pekerjaan dengan pencari kerja yang ada. Pemerintah perlu cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia mengingat jumlah penduduk yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila masalah pengangguran dapat teratasi maka keadaan ekonomi Indonesia bisa semakin membaik dan penduduk Indonesia bisa lebih berkualitas dan mandiri dalam berpenghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu (1) tersedianya informasi akurat terkait lapangan pekerjaan; (2) terselenggaranya pelatihan kerja; (3) pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan; (4) peningkatan sosialisasi terkait literasi informasi berbasis inklusi sosial.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Pemerintah perlu serius dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia dengan mempersiapkan kebijakan, strategi dan langkah konkrit mengatasi permasalahan pengangguran. Pemerintah seyogyanya berkolaborasi dengan perusahaan, lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Franita, Riska. 2016. *Analisis Pengangguran di Indonesia*. Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) Volume 1 Desember 2016 ISSN 2541-657x diakses pada <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97>.

Hermuningsih, Sri (2005). Upaya Mengatasi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Economica Kajian Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Volume 1 Nomor 1 Agustus 2005. ISSN: 1858-2648

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190817113812-4-92715/74-tahun-ri-belum-merdeka-dari-pengangguran-kemiskinan> diakses pada 10 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019> diakses pada 10 Maret 2020 pukul 09.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620259/jokowi-pamer-sukses-turunkan-pengangguran> diakses pada 11 Maret 2020 Pukul 17.00 WIB.

Sukirno, Sadorno. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.